

**PELAKSANAAN MISI KOTA PEKANABARU: PEMBANGUNAN
MASYARAKAT MADANI DALAM LINGKUP MASYARAKAT BERBUDAYA
MELAYU TAHUN 2019**

Oleh:

Firki Mardianto

Email: firkimardianto11@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indicators of civil society as stated by Han Sung-Jun. There is a social movement based on certain cultural values. Therefore, in order to achieve civil society, a view or goal of the new Pekanbaru city government is built in the 2017-2022 period with the vision of the realization of a new week as a civilian smart city. However, Pekanbaru City Government has only implemented Malay culture in government as symbolic, such as wearing Malay clothes as regulated in Perda No.12 / 2001 and only symbolic buildings such as the use of the Salembayung roof. Meanwhile, according to Prof. Dr. Syamsul Nizar M.A said that there are several identities inherent in the Malay community: For the Malay community, Islam is a spirit that provides encouragement and color for all dimensions of adat and community life. Religious symbols are clearly visible in all Malay traditions, Malay is synonymous with hospitality. The Malay community has high self-esteem even though in its absence, Malays always uphold religion, cultural values, friendship and education. The Malay community puts forward deliberation in solving problems.

This research looks at how the implementation of the Malay cultural development mission. More substantially, the goal that will be achieved is to find out the failure model of Paul Light Cascade's implementation, regarding policies, resources, structures, leadership and culture. The location of this research was conducted at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office. Furthermore, data collection techniques are carried out by interview, documentation and literature study.

The results of this study indicate that the Department of Culture and Tourism in implementing its mission seems symbolic because when viewed from the Paul C. Light indicator, the policy dimensions of the Pekanbaru City Disubpar focus more on cultural preservation, not on the development and development of Malay culture itself. In addition, when viewed from the dimensions of resources, limited human resources and funding also contribute to influence. As well as in the dimension of the chain of command structure, activities are also centered on the realization of the promise of the elected regional head, which also has a negative effect on the leadership dimension which is dominated by the will of the elected mayor and added to the plural cultural dimension that increasingly suppresses the existence of Malay culture.

Keywords: implementation, civilization, development, culture, Malay

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat Kebudayaan Melayu yang kemudian tekad tersebut tertuang dalam Perda kota pekanbaru No. 7 Tahun 2017 tentang RPJMD, yang mana terdapat visi dan misi pemerintah kota tahun 2017-2022 (Fahrul Rozi, 2016).

Visi: Terwujudnya Pekanbaru sebagai smart city madani

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertakwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya saing Tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, Yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang layak huni (Live able City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Dengan gambaran visi dan misi yang dicantumkan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam mencapai tujuannya telah mencerminkan konsep civil society. Berikut adalah ciri-ciri atau indikator

masyarakat madani menurut A.S Hikam :

1. Kesukarelaan (*voluntary*)
2. Keswasembadaan (*self-generating*)
3. Keswadayaan (*soft supporting*),
4. Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Suroto, 2015, p. 666).

Selain itu walikota Pekanbaru juga memaparkan beberapa indikator dalam masyarakat madani sebagaimana yang dikutip dari berita online. Firdaus juga menyampaikan 4 indikator masyarakat madani dalam turunan visi-misinya membangun Riau ke depan. Ada empat indikator masyarakat madani.

1. Religi,
2. Sehat rohani dan jasmani,
3. Cerdas, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Berakhlak yang baik serta cinta kepada budaya bangsa," papar firdaus (Apriyanto, 2018).

Untuk mewujudkan cita-cita ke arah masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai prasyarat sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung-Jun, Indikator masyarakat madani yang dikatan Han Sung-Jun adalah sebagai berikut:

1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam

mengartikulasikan isu-isu politik.

3. Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.
4. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi (Suroto, 2015, p. 666).

Dari pemaparan visi dan misi pemerintah Kota Pekanbaru diatas dimana salah satu misi yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah untuk “Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu”. Tetapi pada situasi realnya masih belum terlihat secara nyata didalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Kebudayaan Melayu selama ini baru sebatas simbolik saja yang digambarkan dimaknai melalui pemakaian busana melayu pada Hari Jum’at sesuai Peraturan Daerah Kota Pekan baru Nomor 12 Tahun 2001 dan Pemakaian Atap Salembayung pada bangunan yang ada di kota Pekanbaru.

Prof. Dr. Syamsul Nizar M.A mengatakan bahwa ada beberapa identitas yang melekat pada masyarakat melayu:

1. Bagi masyarakat melayu, Islam merupakan ruh yang memberikan daya dorong dan warna bagi seluruh dimens adat dan kehidupan masyarakatnya. Simbol-simbol agama

terlihat jelas dalam semua tradisi Melayu. Contohnya baju kurung yang longgar bagi kaum wanita dan selendang yang menutupi kepala.

2. Melayu identik dengan keramah-tamahan, baik dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya.
3. Masyarakat melayu memiliki harga diri yang tinggi meskipun dalam ketiadaan.
4. Melayu senantiasa menjunjung tinggi agama, nilai budaya, persahabatan dan pendidikan.
5. Masyarakat melayu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Selain dari pemerintah Kota Pekanbaru maka dukungan masyarakat terutama masyarakat melayu asli untuk mengatasi berbagai hal yang bertentangan dengan nilai budaya melayu itu sendiri, mulai dari tempat hiburan yang berbau maksiat, dari warung tuak sampai karaoke di ruko-ruko terus menjamur. Belum lagi wisma dan hotel yang masih terbuka sebagai tempat melakukan maksiat ke ibukota Provinsi Riau ini. Disamping usaha pemerintah kota maka peranan sosial dalam konsep masyarakat madani juga diperlukan.

Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu. Dari apa yang terlihat dalam program kerja atau misi pemkot pekan baru

diatas jelas realisasinya belum mencapai tahapan sukses dalam penerapannya hal ini terlihat karena ketimpangan fokus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota antara masyarakat madani dan pembangunan Budaya melayu itu sendiri. Seperti yang terdapat pada RPJMD kota pekan baru sasaran yang ingin dicapai oleh Pemkot Kota Pekan baru pada misi Keduanya diatas. Selain itu bagaimana bisa sasaran tersebut tercapai jika hal-hal dasar dari kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk ukuran sebuah kota madani yang berkonsep smart city, tentunya Pemkot Kota Pekan baru belum mampu melakukannya secara utuh.

Selain itu kota pekan baru yang sekarang ini telah dipenuhi oleh masyarakat yang beragam mulai dari masyarakat jawa, melayu, minang dan batak akan membuat tantangan tersendiri dalam mengintegrasinya dalam sebuah nilai luhur yang identik dengan islam pada konsep kota madani tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Pekanbaru. Pastinya juga akan semakin sulit untuk mengembangkan kota madani yang berbudaya melayu karena diperlukan pemahaman mendalam juga tentang budaya melayu yang cocok dan bisa diintegrasikan dengan masyarakat yang beragam ini.

Terdapat beberapa masalah yang masih terkendala dan belum diselesaikan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam *Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu*. Pemerintah Kota Pekanbaru baru sekadar menerapkan budaya melayu dalam pemerintahan

sebagai simbolik saja sementara untuk pengembangan nilai-nilai moral dari budaya melayu itu sendiri belum tumbuh dan belum ada kesadarannya dari masyarakat kota yang beragam saat ini. seperti memakai baju melayu seperti yang sudah diatur dalam Perda No.12 Tahun 2001 dan sebatas simbolik bangunan saja seperti penggunaan atap *Salembayung* belum masuk pada nilai-nilai budaya melayu (Noor Efni Salam, 2017, p. 13) dalam memberikan pelayanan publiknya yang mencerminkan identitas budaya melayu dalam diri aparaturnya. Sehingga tujuan menjaga Kelestarian Nilai-Nilai Tradisi, Seni dan Budaya Melayu dari misi kedua Pemkot Kota Pekanbaru masih belum terwujud.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “ **Pelaksanaan Visi Kota Pekanbaru: Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Progress Pencapaian Misi Smart City Madani Kota Pekanbaru Tentang Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019 masih belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Visi Kota Pekanbaru: Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Misi Kota Pekanbaru: Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019.

Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai pelaksanaan Misi Kota Pekanbaru: Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019.
2. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Misi Kota Pekanbaru: Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu Tahun 2019.

Kerangka Teori

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Merrile Grindle dalam Agustino, mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Menurut Paul C. Light A

Cascade of Failures: *Why Government Fails* (Rentetan Kegagalan : Kenapa Pemerintah Gagal)

Pemerintah telah lama bekerja keras untuk memberikan perawatan yang mantap bagi para veteran bangsa perang, tetapi gagal mencegah penganiayaan tentara yang terluka di Walter Reed atau penantian panjang mereka untuk janji medis di Phoenix. Pemerintah berusaha untuk menjaga, waspada terhadap teror, tetapi gagal mencegah serangan teroris 11 September. Sudah mencoba untuk menjawab panggilan bantuan setelah Badai Katrina, tetapi gagal bertindak dengan pengiriman. Ia mencoba menghentikan kebakaran hutan yang menghasilkan resesi besar, tetapi tidak memiliki kebijakan dan keberanian untuk melakukannya. Dan itu mencoba memantau bahaya yang mungkin dihadapi mobil pengemudi setelah mereka menyalakan kunci kontak, tetapi gagal.

Dalam Tulisan ini dirancang untuk menanyakan empat pertanyaan tentang ini dan pemerintah federal lainnya kegagalan: (1) di mana pemerintah gagal, (2) mengapa pemerintah gagal, (3) siapa yang menyebabkan kegagalan, dan (4) apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah yang mendasarinya? Jawaban mudah untuk pertanyaan-pertanyaan ini diambil dari pepatah penemu bahwa "visi tanpa pengiriman sama dengan halusinasi." Tapi pengiriman tanpa penglihatan sama dengan halusinasi juga. Memang, masalah kebijakan berkontribusi pada 41 kasus dari kegagalan pemerintah pasca-2001 yang sangat terlihat yang dibahas dalam makalah ini.

Kegagalan pemerintah, bagaimanapun, dapat memberikan wawasan penting tentang cara mengurangi kerentanan dan ancaman. Untuk tujuan ini empat karakteristik yang perlu diperhatikan:

1. Sebagian besar kegagalan melibatkan kesalahan kelalaian, bukan komisi. Pemerintah Federal tidak membajak pesawat yang menewaskan begitu banyak orang Amerika 11 September 2001, tetapi tidak membayangkan kemungkinan pada waktunya untuk mencegah tragedi. Itu tidak menembus tanggul ketika Badai Katrina masuk ke darat 2005, tetapi tidak memiliki kepemimpinan atau rencana untuk merespon dengan cepat. Dan ternyata tidak merancang instrumen Byzantium yang memicu keruntuhan perbankan pada tahun 2008, tetapi memiliki sedikit kapasitas untuk menghentikan risiko.
2. Beberapa kegagalan jelas lebih terlihat daripada yang lain. Kegagalan untuk mengantisipasi serangan 9/11, bersiaplah untuk Badai Katrina, hindari keruntuhan finansial, dan mencegah tumpahan minyak Teluk tetap menjadi berita selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sementara penutup Plame melanggar, pembunuhan Haditha dan Blackwater, Vioxx penarikan obat anti-inflamasi, dan Operation Fast and Furious muncul untuk a satu atau dua

minggu di berita utama sebelum menghilang.

3. Visi dengan eksekusi adalah pendorong kesuksesan yang jelas, seperti halnya ketidakhadirannya persamaan untuk kegagalan. Indeks Minat Berita tidak cukup berhasil untuk membangun kelompok kontrol untuk memeriksa silang kontributor kegagalan yang dibahas di bawah. Memang, saya menghitung hanya sembilan keberhasilan di daftar Center, enam di antaranya terlibat perang melawan terorisme; dua melibatkan pendaratan Mars yang sukses; dan satu melibatkan penarikan kembali mobil Toyota 2009-2011. Meski demikian, meski sesingkat ini daftar keberhasilan memperkuat temuan saya selanjutnya tentang kegagalan.

Pemerintah bisa gagal karena berbagai alasan, termasuk beberapa yang berada di luar kendali nya. Dengan buruk kebijakan yang dirancang berasal dari Kongres dan presiden, misalnya, dan mungkin mustahil untuk melaksanakan terlepas dari komitmen birokrasi. Apalagi, pemerintah tidak selalu bias berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, mengimbangi kepemimpinan yang buruk, dan mengelola kebingungan yang ditimbulkan duplikasi dan tumpang tindih di Capitol Hill. Kontributor kegagalan termasuk lima kategori:

1. Kebijakan: Pemerintah mungkin belum diberi kebijakan, atau kebijakan apa pun, dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang

- dihadapi; atau kebijakan mungkin salah satunya terlalu sulit untuk disampaikan atau didelegasikan kepada yang rentan atau secara historis tidak dapat diandalkan organisasi.
2. Sumber Daya: Pemerintah mungkin tidak memiliki cukup dana, staf, atau "Kapasitas jaminan" seperti teknologi informasi, sistem pengawasan, atau pengalaman teknis untuk memberikan dampak kebijakan yang konsisten.
 3. Struktur: Pemerintah mungkin tidak dapat meningkatkan informasi dan bawah rantai komanda nya yang berlapis-lapis, memilih dan mengawasi kontraktor nya, atau mengatasi kebingungan yang terkait dengan duplikasi dan tumpang tindih.
 4. Kepemimpinan: Orang yang ditunjuk oleh pemerintah mungkin tidak memenuhi syarat untuk memimpin; bisa saja membuat keputusan yang buruk sebelum, selama, dan setelah kegagalan muncul; atau mungkin mengambil posisi mereka setelah penundaan lama yang dibuat oleh presiden proses janji temu.
 5. Budaya: Pemerintah mungkin telah menciptakan misi yang membingungkan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dikomunikasikan dan dipeluk, dengan mudah dirusak oleh korupsi tingkat dan perilaku tidak etis, atau melampaui pemantauan

cermat melalui kinerja pengukuran dan manajemen.

B. *Smart City*

Definisi atau pengertian *Smart City* sangat beraneka ragam. Konsep tersebut sudah dikenal dengan populer, namun dalam praktek nya digunakan di berbagai negara dengan istilah yang berbeda-beda dan situasi yang berbeda pula. Ada penggunaan berbagai jenis konsep mengganti *smart* dengan istilah kata sifat lainnya. Menurut Wikipedia, *smart city* adalah visi pembangunan perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) dan solusi *Internet of Things (IOT)* dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota. Berdasarkan Wikipedia, definisi dari *Smart City* itu begitu luas mencakup berbagai macam keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, mengurangi biaya dan sumber konsumsi, dan dapat meningkatkan interaksi aktif antara kota dan warganya secara efektif.

Deakin mendefinisikan kota pintar sebagai salah satu yang memanfaatkan *ICT* untuk memenuhi tuntutan pasar (warga kota), dan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk sebuah kota pintar. Sehingga Kota cerdas akan menjadi kota yang tidak hanya memiliki teknologi *ICT* di daerah tertentu, tetapi juga telah menerapkan teknologi ini dengan cara yang positif berdampak pada masyarakat setempat.

Karakteristik bahwa kota pintar (juga masyarakat, kluster bisnis, aglomerasi perkotaan atau wilayah) menggunakan teknologi informasi untuk:

1. Membuat lebih efisien penggunaan infrastruktur

fisik (jalan, lingkungan dibangun dan aset fisik lainnya) melalui intelijen dan data buatan analisis untuk mendukung, pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial.

2. Terlibat secara efektif dengan orang-orang lokal dalam pemerintahan lokal dan keputusan dengan menggunakan proses inovasi terbuka dan *e-partisipasi*, meningkatkan kecerdasan kolektif dari lembaga kota melalui *e-governance*, dengan penekanan pada partisipasi warga dan co-desain.
3. Belajar, beradaptasi dan berinovasi dan dengan demikian merespon lebih efektif dan segera untuk mengubah keadaan dengan meningkatkan kecerdasan kota (Chandra Eko Wahyudi; Mochamad Hariadi, 2016, p. 161).

Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun *Smart City* (Siti Widharetno Mursalim, 2017, p. 135) adalah:

- a. Peran pemerintah
- b. Dukungan masyarakat
- c. Pembiayaan
- d. Teknologi

C. Konsep masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang seringkali digunakan orang dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, padanan kata *civil society*. Disamping masyarakat madani, padanan kata lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau masyarakat kewargaan,

masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.

Istilah *civil society* juga ada yang mengartikannya identik dengan “masyarakat berbudaya (*civilized society*)”. Lawannya adalah “masyarakat liar (*savage society*)”. Pemahaman yang melatari arti ini sekedar mudahnya, agar orang menarik perbandingan di mana kata yang pertama merujuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan politik), sedangkan kata yang kedua jika dapat diberikan menurut pemikiran Thomas Hobbes, bermakna identik dengan gambaran masyarakat tahap “keadaan alami” (*state of nature*) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara dimana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya (*homo hominy lupus*) (Adi Suryadi Cula, 1999, p. 5).

Mendekati pengertian “masyarakat berbudaya”, terjemahan lain yang sering digunakan adalah masyarakat madani. Dibanding istilah lainnya istilah ini yang paling populer dan banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Apakah makna istilah ini? Tak pelak bahwa kata “madani” merujuk pada Madani sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab, dimana masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholish Majid kata “madinah” berasal dari bahasa Arab “madaniyah” yang berarti peradaban. Karena itu, masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab”.

Pemaknaan lain masih menurut Nurcholish Majid, kata “madani” dalam bahasa Arab dapat juga diartikan sebagai kota. Dengan

demikian masyarakat madani berarti masyarakat kota. Tetapi dengan pemaknaan ini juga muncul pernyataan baru berikutnya: mengapa masyarakat kota? Jelas kota yang dibangun Nabi Muhammad dahulu merupakan sebuah city-state; sesuatu yang mengingatkan bentuk polis Yunani Kuno (Adi Suryadi Cula, 1999, p. 5).

Henningsen berpendapat bahwa masyarakat madani pada dasarnya identik dengan ruang publik (public sphere) dalam masyarakat modern yang berfungsi dengan baik. Sebuah masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut memiliki empat komponen :otonomi, akses terhadap lembaga Negara, arena public yang bersifat otonom, arena publik tersebut bagi semua lapisan masyarakat Akbar Kaelola (2009 : 53) .Secara harfiah, “civil society” pertama kali digunakan dalam makna seperti yang ada sekarang oleh Adam Fergusson.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir atau cara pandang (*research approach*) peneliti dalam mendesain riset dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan

selama proses penelitian berlangsung. pendekatan penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif. menurut (Sugiyono, 2014) apabila penelitian itu menggambarkan proses, memahami makna dan perasaan, mengurai masalah yang kompleks men konstruksi fenomena maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan:

1. fenomena dimana salah satu misi yang dicanangkan dalam RPJMD nya adalah *Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu* .
2. adanya wacana provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan melayu hal ini juga akan berdampak luas bagi kota pekan baru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi. (Ahmadi, 2016) Patton menyatakan bahwa sumber utama data kualitatif apa yang orang-orang itu (informan) katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survei.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar, 2003). dalam mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk menggali dan memperdalam informasi yang relevan dan mendukung penelitian. Informan merupakan sumber data dalam penelitian maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling. Craswell (2007:125) menjelaskan bahwa konsep penarikan sampling bertujuan (purposeful) digunakan dalam penelitian kualitatif. Maksudnya peneliti langsung menyeleksi individu berdasarkan posisinya dalam penelitian dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang dibutuhkan, memahami permasalahan penelitian dan merupakan pusat fenomena dalam penelitian itu (Adlin, 2013, p. 63). Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.2
Tentang Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan	Nama Informan
1.	Wakil Wali Kota Pekanbaru	1	Ayat Cahyadi
2.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	1	Dr.H. Nurfaisal, M.Pd
3.	Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	1	Syahrul, S. Pd, M.Pd
4.	Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru	1	Datuk Oki Tabrani SH
5.	Kasubag Program Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru	1	Aisyah Novianti
6.	Masyarakat Kota Pekanbaru	5	Random
	Jumlah		10

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005). Terkait dengan data sekunder penulis memperoleh data melalui:

- a. Data Regulasi tentang Visi dan Misi Kota Pekan baru yaitu Perda no.7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekan baru, Perda No. 12 Tahun 2001 tentang penggunaan busana Melayu
- b. Media online dan website: Tribun Pekan baru, Go Riau, Riau pos dll.
- c. Data Dokumen: RENJA DISBUBPAR Kota Pekan baru tahun 2018-2019, RENSTRA, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dua cara, yakni: 1) untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka kepada informan penelitian seperti pada tabel sebelumnya ; 2) Untuk mendapatkan data sekunder penelitian, penulis akan

mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan misi smart city madani tentang pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini pengolahan data menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, bahwa analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. reduksi data: reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
2. penyajian data: penyajian data adalah sekumpulan data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. penarikan kesimpulan/verifikasi: data yang terkumpul secara sistematis diberi makna sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh kemudian dilakukan verifikasi agar terjadi kecocokan dan teruji kebenarannya (validitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan Budaya Melayu

Keberhasilan suatu kebijakan yang diusung pemerintah memiliki karakteristik dan model yang berbeda. Dimana dalam konteks kebijakan publik keberhasilan suatu kebijakan terletak pada unsur implementasi oleh pemerintah yang sedang membangun daerahnya atau sedang mewujudkan misi pembangunan pemerintahan. Pada bagian ini menjelaskan perihal implementasi misi dengan menggunakan model Light Cascade (Kebijakan, Sumberdaya, Struktur, Kepemimpinan dan Budaya).

Dimensi Kebijakan (*Policy*)

Government might not have been given the policy, or any policy at all, needed to solve the problem at hand; or the policy might have been either too difficult to deliver or delegated to a vulnerable or historically unreliable organization (Pemerintah mungkin belum diberi kebijakan, atau kebijakan apa pun, dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi; atau kebijakan mungkin salah satunya terlalu sulit untuk disampaikan atau didelegasikan kepada yang rentan atau secara historis tidak dapat diandalkan organisasi).

Terkait dengan kebijakan tentunya kita juga berbicara tentang formulasi atau perumusan kebijakan yang kita kenal dengan perencanaan. Kebijakan ini terkait dengan tiga pola yaitu disain (*Design*), Tingkat

Kesulitan (*degree of difficult*) dan penugasan (*assignment*). dengan tiga pertanyaan pokok yang harus diperhatikan:

- Apakah kebijakan dibuat dengan buruk untuk masalah yang sedang dihadapi?
- Apakah kebijakan secara inheren sulit untuk dilaksanakan?
- Apakah kebijakan diterapkan pada organisasi pengiriman yang rusak?

Berbicara tentang desing kebijakan atau lebih tepatnya perencanaan Bintoro Tjokroamidjojo (1985), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum *output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Penyusunan perencanaan mengindikasikan adanya organisasi yang terlibat, adanya dokumen yang digunakan di dalam perencanaan, adanya dukungan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan adanya tujuan yang jelas akan dicapai (Fahima Diah Annisa, 2019, p. 41).

Transformasi Sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumberdaya Sosial-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan,

air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik (Sondang P. Siagian, 2003, p. 95).

Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain; dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat seperti perubahan dan spiritualism eke materialism/ sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi pada penguasa materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Menurut Korten sebagaimana yang diulas kembali oleh Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013), menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Menurut WALHI, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya menuju masyarakat yang berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
2. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok lain atau generasi kemudian.
3. Memperbaiki kualitas hidup manusia.

4. Tujuan dari pembangunan adalah perbaikan mutu hidup manusia yang memungkinkan manusia mengetahui potensi mereka, membangun percaya diri dan masuk kehidupan yang bermartabat dan berkecukupan dan lain-lain (Andi Heny Mulyadi, 2018).

Proses manajemen strategi ini meliputi rencana-rencana jangka panjang maupun pendek untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Manajemen strategi sektor publik mengarahkan organisasi sektor public untuk melakukan perencanaan manajemen dengan mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian fokus manajemen strategis adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, merumuskan strategi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik. Organisasi juga diharapkan akan mampu mengendalikan arah pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan, sehingga organisasi sektor publik mampu memberikan kinerja yang lebih maksimal (Hubertus Oja, 2016, p. 4).

Menurut Ibrahim (2008), manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka

pendek serta menengah. Strategi penting karena merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal untuk keputusan-keputusan yang akan menuntun ke arah pencapaian tujuan organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan. Menurut Johnson dan Scholes (Bovaird, 2003), keputusan strategis menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya, alokasi dan realokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi

yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen strategis adalah suatu proses yang dalam setiap tahapnya memerlukan partisipasi dari semua pihak, dan pertanggungjawaban dari pemimpin. Dengan demikian manajemen strategis meliputi penetapan kerangka kerja untuk melaksanakan berbagai proses tersebut (Hubertus Oja, 2016, p. 6).

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

Table. 3.1
Manajemen Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu	Mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai	Meningkatnya kesadaran hukum	Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum aparaturnya dan masyarakat.
		Terjaganya kelestarian nilai-nilai tradisi, seni dan Budaya Melayu.	Terwujudnya perlindungan dan pengembangan budaya melayu	Peningkatan penerapan budaya melayu

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

KABID Program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru ibu Aisyah Novianti Menuturkan:

“Dalam realisasi misi pembangunan jangka menengah RPJMD itu diberatkan dan dibebankan pada realisasi janji-janji kampanye kepala daerah terpilih, kita dari Disubpar untuk hal-hal terkait dengan pembangunan budaya melayu itu hanya melaksanakan program dari kepala daerah terpilih saja. Selain itu kita hanya melakukan apa yang telah disepakati dalam APBD dan realisasi program saja”.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejumlah derajat (*implementability*) kebijakan tersebut. *Pertama*, variable isi, yang meliputi: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (*target groups*) termuat dalam isi kebijakan. (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan. (3) derajat perubahan yang diinginkan, atau sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) kedudukan pembuat kebijakan. apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) pelaksana program, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. (6) Sumber daya yang memadai. *Kedua* variable implementasi, yang meliputi: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Seberapa besar kekuasaan,

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. (2) karakteristik lembaga dan penguasa. (3) kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun, tidak semuanya program yang diimplementasikan benar-benar berlangsung mulus dan efektif, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan adanya perbedaan antara harapan pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Keadaan ini oleh Dunsire (1978) dalam Wahab (1997: 61) dinamakan *implementation gap*. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh William (1971; 1975) dalam Wahab (1997: 61) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Wakil Walikota Pekanbaru terkait dengan Perencanaan Penulis memperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

“Sosialisasi dan komunikasi visi dan misi tersebut melalui program dan kegiatan setiap OPD atau strategi kerja pembangunan daerah

Oleh karena itu untuk perencanaan jangka menengah sendiri itu memang dominan dengan realisasi janji-janji kampanye kami dahulu tetapi juga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya pembangunan itu sendiri diambil dari partisipasi masyarakat kita yang ada di pekanbaru ini”.

Secara obyektif, bahwa kebijakan negara mengandung resiko untuk gagal. Pengertian kegagalan kebijakan negara oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam Wahab (1997: 61-62) dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *Non Implementation* (tidak terimplementasikan), ini mengandung beberapa berupa: Kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana; Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerjasama; Bekerjanya tidak efisien; Tidak menguasai permasalahan dan diluar jangkauan kekuasaan; atau Hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. (2) *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil). Inipun mengandung alasan berupa: Kondisi eksternal tidak menguntungkan; Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan yang gagal biasanya disebabkan oleh beberapa faktor: (1) pelaksanaannya memang jelek (*bad execution*), dalam arti pelaksana tidak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan kebijakan; (2)

Kebijakannya tidak mencerminkan kepentingan rakyat atau kebijakannya jelek (*bad policy*), dan atau (3) karena tidak sesuai dengan harapan rakyat maka kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997).

Apabila suatu kebijakan yang diimplementasi mengalami kegagalan, maka dapat menimbulkan pertanyaan mengapa kegagalan itu dapat terjadi. Mengetahui sebab kegagalan, dapat memberi penjelasan tentang bagaimana cara mengatasinya dan implementasinya dapat dikembangkan. Sebab kegagalan implementasi suatu kebijakan berbeda antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek sebagaimana yang dikemukakan oleh Maarse (dalam Wahab, 1997), yaitu (1) isi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (2) tingkat informasi dari pelaku yang terlibat, (3) banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diimplementasikan, dan (4) pembagian potensi.

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	output
I	Program Pengembangan Nilai Budaya	94.479.804	93.109.000	Terwujudnya Perkembangan Nilai Budaya
	pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	94.479.804	93.109.000	Jumlah Kegiatan Pelestarian (Perlindungan/Pengembangan Atau Pemamfaatan) Dan Aktualisasi Adat Budaya Kota Pekanbaru
II	Program Pengelolaan Kekayaan	1.428.242.976	1.315.044.676	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya
	sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	881.201.876	797.910.976	Jumlah Sosialisasi/Kegiatan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
	pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	576.041.100	517.133.700	Jumlah Event Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
III	program pengelolaan keragaman budaya	378.819.185	377.489.248	Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya
	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	378.819.185	377.489.248	Jumlah Even/Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

Sumber: LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2019

Pembangunan Kebudayaan Melayu tentunya masih dalam konteks konsep yang diusahakan agar tujuan misi ini dapat dilaksanakan secara bijaksana oleh pemerintahan yang sedang digalakkan. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan

memberikan keamanan bagi pertumbuhan dan perkembangan eksistensi budaya lokal dengan berbagai budaya plural yang ada di Kota Pekanbaru. Namun yang menjadi perhatian dari disain kebijakan pembangunan kebudayaan Melayu ini adalah mempertimbangkan

kualitas di lingkungan masyarakat, hal ini dikatakan oleh Wakil Walikota Pekanbaru Bapak Ayat Cahyadi:

“Melaksanakan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan Nilai dan Budaya di lingkungan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal, (2) pengelolaan kekayaan budaya lokal, (3) program pengelolaan Keragaman Budaya.”

Sasaran yang dicapai dari dimensi kebijakan dalam konteks pembangunan budaya melayu ini, tidak saja dilakukan di lembaga formal dan nonformal kebudayaan saja namun dapat juga dilakukan melalui pembinaan antar masyarakat dalam meningkatkan kepedulian dan antusiasme masyarakat serta pemerintah untuk lebih mengefektifkan lembaga-lembaga kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai budaya melayu ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru.

Kepala Bidang Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu Ibu Aisyah Noviyanti mengatakan bahwa:

“Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru Terutama yang terkait dengan Perencanaan RPJMD Kota, itu kami murni men terjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih saja yang telah tertuang di dalam APBD di tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan

target dan ukuran yang harus dicapai dalam pembangunan budaya. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan budaya melayu ini kami memang lebih dominan pada penerjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih dan penyesuaian dengan perencanaan tingkat provinsi, artinya penyusunan ini didominasi oleh pendekatan politis dan Top-down, untuk porsi Bottom-up dan Partisipatif itu sangat minim kami gunakan, hal ini dikarenakan susah nya menentukan indicator dari sebuah pembangunan budaya, standar pencapaiannya itu sulit diukur makanya lebih difokuskan pada realisasi janji kampanye kepala daerah terpilih saja, ya dikarenakan RPJMD ini memang lebih banyak didominasi dan focus pada perencanaan kepala daerah terpilih”.

Selain itu dikesempatan yang sama beliau juga menjelaskan bahwa:

“untuk mewujudkan misi pembangunan budaya melayu ini sesuai dengan visi Pemkot, kami dari DISBUPAR bergerak dalam bentuk sanggar kesenian dan Cagar Budaya, Melaksanakan program/kegiatan yang mengarah pada pembangunan

budaya melayu di lingkungan masyarakat melalui perawatan benda cagar budaya dan kegiatan-kegiatan yang berbau budaya melayu seperti pantun, (2) pembinaan untuk generasi muda melalui event-event kebudayaan, Bujang-Dara Kota Pekanbaru (3) penataan sanggar seni dan benda-benda cagar budaya, (4) pembinaan keberagaman antar masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya melalui keterlibatan kebudayaan melayu dalam acara-acara formal pemerintahan Kota Pekanbaru”.

Dimensi Sumberdaya (*Resources*)

Government might not have had enough funding, staff, or the “collateral capacity” such as information technology, oversight systems, or technical experience to deliver consistent policy impact. (Pemerintah mungkin tidak memiliki cukup dana, staf, atau "Kapasitas jaminan" seperti teknologi informasi, sistem pengawasan, atau pengalaman teknis untuk memberikan dampak kebijakan yang konsisten.

Pada bagian ini terdapat tiga poin penting yang harus terpenuhi : Anggaran (Budget), Sumberdaya manusia (Human Capital), jaminan kapasitas (Collateral Capacity). Dengan tiga pertanyaan terkait:

- Apakah ada staf yang cukup untuk menyampaikan kebijakan?

- Apakah ada jaminan yang cukup misalnya teknologi informasi untuk menyampaikan kapasitas jaminan?

Pasca Orde Baru masyarakat Riau mencanangkan sebuah visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan segenap tokoh masyarakat Riau, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2001 berbunyi, "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkup masyarakat yang agamais, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020". Secara implisit visi Riau ini mengandung makna bagi masyarakat Riau dalam menjalankan kehidupan, antara lain yang terpenting sebagai identitas budaya mereka (Noor Efni Salam, 2017).

Fromm dalam Yusuf(2005:17) mengatakan bahwa identitas bagi sekelompok masyarakat mutlak dimiliki dan dipertahankan, identitas sepadan dengan permasalahan integritas. Seseorang yang tidak mempunyai identitas yang jelas atau kabur dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai integritas pribadi yang kuat. Artinya, suatu daerah yang integritasnya lemah dihubungkan dengan lemahnya jati diri masyarakat tersebut. Dengan demikian identitas adalah kebutuhan setiap individu maupun masyarakat, karena tanpa adanya identitas

kolektif eksistensi sebuah daerah akan sulit diakui.

“Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya Disbudpar Kota Pekanbaru Bapak Syahrul, S.Pd. M. Pd mengatakan bahwa “kita harus benar-benar menyiapkan sumber daya aparatur di bidang kebudayaan dan kesenian daerah yang benar-benar paham akan budaya Melayu; penyiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan budaya melayu itu sendiri. Sementara saat ini dalam tim perencanaan kita di Kota Pekanbaru kami kesulitan dalam memahami dan indicator yang menjadi ukuran dari sebuah pembangunan Budaya Melayu itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya jika benar-benar diperhatikan pada RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 ini IKU yang digunakan sebagai ukuran masih terlaui samar-samar dan sulit dikatakan bahwa itu adalah standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Budaya ini yang memang sulit untuk diukur karena tidak dapat dilihat secara fisik”.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Program DISBUBPAR Kota Pekanbaru

penulis memperoleh informasi mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam pembangunan budaya melayu pada masyarakat heterogen kota pekanbaru sebagai berikut:

“Sejauh ini program yang kami rencanakan dalam RKPD itu tercapai semua untuk pembangunan budaya melayu sendiri yang menjadi lingkup perencanaan kami terkait urusan kebudayaan dibidang cagar budaya dan sanggar seni, hanya saja kendala yang kami hadapi itu masih ada berupa tidak adanya tim ahli cagar budaya serta kuatnya arus globalisasi membuat perhatian masyarakat akan kebudayaan dan kearifan local menjadi tidak terlalu peduli. Tetapi untuk menutupi hal ini kami dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mencoba untuk memanfaatkan IT juga dalam program kami terutama itu pemanfaatan media sosial guna menarik perhatian generasi muda melalui publikasi dan event-event kebudayaan yang kami buat dan itu ada di bagian publikasi MEDSOSnya DISBUBPAR Kota Pekanbaru”.

Begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya yang digagas dan dikemas oleh pemerintah daerah setempat sebagai strategi untuk mempertahankan identitas budaya Melayu Riau, seperti penggunaan busana Melayu di kalangan masyarakat Riau, yang sudah diatur

dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2001 Kemudian penggunaan Salembayung sebagai model bangunan/arsitektural Melayu yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan berbagai bentuk kesenian rakyat, wisata kuliner , hingga sector pariwisata yang mengangkat dan menghidupkan kembali nilai-nilai Budaya Melayu serta memajukan budaya dan masyarakat Melayu Riau.

Dari sekian banyak aspek sosial budaya yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan ada tujuh aspek yang sangat menonjol ialah (a), bahasa, (b) adat istiadat dan tradisi, (c) persepsi tentang kekuasaan, (d) hubungan dengan alam, (e) *locus of control*, (f) pandangan tentang peranan wanita, (g) sistem keluarga besar (*extended family system*). Dengan perkataan lain, keseluruhan masalah sosial budaya yang harus dihadapi dan dipecahkan melalui pembangunan sosial budaya berkisar pada sistem nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai keseluruhan (Gun Faisal; Dimas Wihayanto , 2013). Penelitian dan pengalaman banyak Negara menunjukkan bahwa terdapat sejumlah nilai yang perlu dilestarikan karena menyangkut jati diri yang sifatnya khas dan membedakan dengan yang lainnya.

Dalam proses waktu yang panjang masyarakat Melayu-pun mengalami berbagai perubahan dalam aspek kehidupan. Perjalanan

sejarahnya telah membentuk dan ditemukan berbagai nilai yang kemudian diterima sebagai pedoman dan filosofi kehidupan oprang Melayu. Dengan pedoman berbagai nilai tersebut setiap suku atau komunitas membentuk tradisi kehidupannya. Tradisi kehidupan itu biasanya terbentuk setelah nilai-nilai itu diteruskan dan dipelihara dari generasi ke generasi.

Dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan pemerintahan Kota Pekanbaru, salah satu syarat adalah pengembangan sumber daya yang memadai, sehingga hal ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sumber daya yang dimaksudkan ini tidak sekedar pada satu aspek yaitu sumber daya manusia akan tetapi juga sumber daya pendukung lainnya seperti infrastruktur lainnya yang mendukung implementasi kebijakan visi dan misi pembangunan pada Kota Pekanbaru.

Kualitas sumber daya manusia yang mendorong terwujudnya misi sehingga menciptakan kota Pekanbaru yang madani dalam lingkup berbudaya melayu. Untuk itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan melalui beberapa aspek. Hal ini dikatakan unsur Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru yang terkait dengan bidang kebudayaan menurutnya bahwa:

Masih rendahnya pelayanan pada setiap instansi pemerintahan dalam

menerapkan konsep-konsep budaya melayu dalam pemberian pelayanan publik. di semua tingkatan baik di desa/kecamatan, pemahaman setiap aparatur yang masih rendah tentang etika pelayanan yang dilandasi oleh budaya melayu atau kearifan lokal. Sementara itu, pada bidang pembinaan aparatur pemerintahan tidak diarahkan pada pengetahuan dan pelatihan serta bimbingan teknik dalam memanfaatkan budaya lokal dalam pelayanan.

Dengan demikian bagi masyarakat Melayu di Riau, adat memiliki peran sangat penting dan berfungsi sebagai wadah penyambung jati diri atau identitas masyarakat. Sesuai dengan pepatah Melayu “ dimana bumi di pijak disitu langit di junjung”. Pepatah ini selalu didengungkan dalam berbagai kesempatan di bumi Lancang Kuning (Riau), hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dengan kelestarian

budaya Melayu di tengah ancaman budaya-budaya luar. Memang diakui budaya Melayu masih terlihat kental dianut oleh masyarakat di pedesaan, namun di kawasan perkotaan budaya Melayu mendapat ancaman (Noor Efni Salam, 2017).

Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa tahun yang lalu , bekerjasama dengan TEF menggelar seminar bertajuk Interaksi Kebudayaan Melayu di masyarakat Perkotaan, yang diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 25 November 2006 yang lalu. Dalam seminar tersebut budayawan sekaligus pendiri TEF, Tennas, menyebutkan bahwa kelestarian Budaya Melayu di Kota Pekanbaru cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melestarikan budaya Melayu, maka harus dijelaskan dulu “tanda” atau “Identitas Melayu” itu sendiri. “seperti Aceh, Yogyakarta, Minang dan Bali, begitu kuat budayanya karena tanda,” katanya.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2018	2019		
1.	Belum adanya payung hukum untuk situs-situs yang diduga sebagai cagar budaya melayu	Belum adanya payung hukum untuk situs-situs yang diduga sebagai cagar budaya Melayu.	Belum memiliki tim ahli cagar budaya di kota pekanbaru.	Ketersedian data yang diduga sebagai cagar budaya.
2.	Belum bakunya berbagai bentuk kesenian melayu, bahasa melayu	Belum bakunya berbagai macam bentuk kesenian melayu dan	Belum adanya kajian dan pengakuan tentang kesenian dan	Tersedianya berbagai corak seni dan budaya serta dialek bahasa melayu di kota

	yang merupakan ciri khas kota pekanbaru.	bahasa melayu yang merupakan ciri khas kota Pekanbaru.	bahasa melayu yang menjadi ciri khas kota pekanbaru.	pekanbaru.
3.	Masih terbatasnya jumlah lembaga dan sanggar seni budaya melayu yang terdaftar. Data LPJ Tahun 2018 menyebutkan baru ada 70 sanggar seni yang terdaftar di DISBUBPAR Kota Pekanbaru dan baru 12 sanggar yang aktif.	Masih terbatasnya jumlah lembaga dan sanggar seni budaya melayu yang terdaftar.	Belum terdaftar secara legal akibat kurangnya informasi dan pengetahuan.	Tersedia lembaga dan sanggar seni budaya yang beraktifitas di kota Pekanbaru.

Sumber: Data Permasalahan diatas diambil dari RENJA DISBUDPAR Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tentunya untuk menjawab dan mengarahkan beberapa bidang strategis ini dalam mewujudkan misi pembangunan maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah; (1) adanya perumusan agenda dalam proses tindak lanjut, (2) perumusan target capaian untuk masing-masing program, (3) penetapan alokasi pemberdayaan dan anggota, (4) bagaimana mengimplementasikan, (5) pengawasan, (6) evaluasi untuk menjamin tindak lanjut yang efektif .

Berdasarkan kondisi inilah penulis berasumsi perlunya merevitalisasi, mengeksisikan atau mempersaksikan kembali budaya yang dulunya menjadi panutan masyarakat, menjadi budaya yang benar-benar merupakan pedoman

bagi masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kondisi ini tidak mendapat perhatian yang serius bagi pendukungnya dapat berakibat kehilangan identitas sebagai orang Melayu. Kondisi ini mungkin akan berlanjut sampai masa depan jika tidak ada perubahan strategi yang berorientasi pada kebudayaan.

Dimensi Struktur (structure)

Government might have been unable to move information up and down its over-layered chain of command, select and supervise its contractors, or resolve the confusion associated with duplication and overlap .(Pemerintah mungkin tidak dapat meningkatkan informasi dan bawah rantai komando nya yang

berlapis-lapis, memilih dan mengawasi kontraktornya, atau mengatasi kebingungan yang terkait dengan duplikasi dan tumpang tindih). Berkaitan dengan struktur ini terdapat tiga pertanyaan penting yang menjadi titik tolak yaitu:

- Apakah ada rantai komando yang jelas antara bagian atas dan bagian bawah dari organisasi pengirim rantai komando?
- Apakah kontrak outsourcing dan kegagalan untuk mengawasi kinerja berkontribusi pada kegagalan kontraktor dalam outsourcing?
- Apakah ada organisasi yang bersaing dan apakah duplikasi tumpang tindih?

Sesuai dengan data yang tertera dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan yaitu masih rendahnya pemahaman nilai-nilai budaya di masyarakat. Hal ini bisa terlihat dari yang kasat mata seperti pemakaian bahasa, pakaian, dan bentuk bangunan/lanskap. Bahasa melayu sebagai bahasa daerah masih belum dominan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari di Kota Pekanbaru. Penggunaan pakaian melayu (teluk belanga dan baju kurung) masih belum merata, terutama di instansi swasta, perhotelan, dan kuliner. Selain itu, bentuk bangunan/lanskap yang mengadopsi pola-pola Melayu masih terbatas pada instansi pemerintah

saja, sementara instansi swasta, perhotelan dan rekreasi masih minim penggunaannya.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Pekanbaru, rumusan isu strategis dengan permasalahan utama Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan perkotaan yang memadai
2. Kesejahteraan masyarakat masih rendah dan belum optimalnya penanganan masalah sosial perkotaan
3. Rendahnya Daya Saing dan belum terwujudnya kekuatan ekonomi yang berbasis Ekonomi Kerakyatan
4. Pemerintah dan Masyarakat belum smart dalam mewujudkan pembangunan dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik
5. Masih kurangnya penerapan ajaran agama dan budaya melayu dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan pemerintahan sebagai dimensi dalam misi pembangunan pemerintahan Kota Pekanbaru, para aktor kebijakan dan elit politik, tidak saja memiliki pengetahuan dalam menentukan dan membangun kebijakan tetapi, komitmen, nilai kejujuran, kepercayaan dan bahkan nilai-nilai demokrasi menjadi instrumental utama dalam implementasi misi menuju

pembangunan. Wakil Walikota Pekanbaru Bpk Ayat Cahyadi mengatakan bahwa:

“Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan yang baik itu belum cukup tanpa didukung kemampuan SDM yang memadai, dengan kepercayaan dan SDM yang handal, tak cukup namun perlu komitmen. Untuk itu kita sangat berkomitmen pula untuk terus menerus memacu SDM aparatur sekaligus mengasuh komitmennya yang bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan ini untuk kemajuan kota yang nantinya bisa setara dengan daerah lainnya walaupun disana-sini masih harus dibenahi dari sisi SDM dan Kelembagaan”.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan misi pembangunan pemerintahan Kota Pekanbaru, tidak hanya mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas, namun komitmen, kepercayaan dan karakter dari aktor kebijakan pembangunan menjadi unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena dengan modal dan dasar inilah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan ditetapkannya. Komitmen dan kepercayaan dalam pembangunan juga di jelaskan wakil Walikota Pekanbaru bahwa;

“Dengan berbekal kemampuan dan

komitmen terhadap kebijakan yang jelas, ditetapkan dalam perencanaan, maka implementasi visi dan misi dapat berjalan secara konsisten untuk pencapaian misi pembangunan kota Pekanbaru”.

Arah kebijakan dalam kebudayaan yang perlu diperhatikan antara lain melakukan penggalian, pengkajian dan memutakhirkan kebudayaan melayu secara terpadu dan berkesinambungan. tujuannya adalah meningkatkan kesadaran berbudaya Melayu dalam upaya menangkal budaya luar (asing) yang negative. Dalam tulisan ini berupaya mengungkapkan penggalian khasanah budaya Melayu yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan tersebut dan menetapkan pembangunan kebudayaan. Berikut adalah tabel implementasi dari RPJMD Kota Pekanbaru terkait dengan Implementasi Misi Kedua Kota Pekanbaru jika Kita lihat Dari Rantai komando Top-Down dari Pemerintah Kota Kepada Dinas Kebudayaan Kota Pekanbaru.

Terlepas dari capaian dinas kebudayaan dan pariwisata diatas selama tiga tahun ke belakang, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru dalam melakukan

pembangunan kebudayaan itu sendiri diantaranya adalah:

- Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap kebudayaan daerah.
- Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang kebudayaan.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya
- Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan seni budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas.
- Pengaruh budaya luar (westernisasi/globalisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relative sangat tinggi.
- Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni, komunitas-komunitas seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kota Pekanbaru.
- Belum cukup tersedianya gedung pertunjukkan seni budaya yang representative.
- Belum optimalnya koordinasi/kerjasama antar daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dan Kebudayaan (Pekansikawan).

- Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap.
- Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kebudayaan.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan.
- Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat ter legalisasi.
- Belum terkelolanya secara maksimal dan berkelanjutan kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (tangible) maupun yang tak benda (intangible).

Dimensi Kepemimpinan (Leadership)

Government's top appointees might have been unqualified to lead; could have made poor decisions before, during, and after the failures appeared; or might have taken their posts after long delays created by the presidential appointments process (Orang yang ditunjuk oleh pemerintah mungkin tidak memenuhi syarat untuk memimpin; bisa saja membuat keputusan yang buruk sebelum, selama, dan setelah kegagalan muncul; atau mungkin mengambil posisi mereka setelah penundaan lama yang dibuat oleh presiden proses janji temu.

Terkait dengan hal ini terdapat tiga poin penting yang menjadikan tolak ukurnya yaitu keahlian (expertise), pengambilan keputusan (decision making), peluang dan penundaan (vacancies and delays).

Dengan tiga pertanyaan dasar yang harus dijawab:

- Apakah pemimpin politik dan karier memenuhi syarat untuk menyampaikan kebijakan?
- Apakah pemimpin politik dan karier membuat keputusan yang efektif sebelum, selama dan setelah kegagalan?
- Apakah kepemimpinan politik dan karier sudah siap pada waktunya untuk menyampaikan kebijakan?

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Oki Tabrani, SH dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru juga menyebutkan bahwa:

“Smart City Madani yang digagas oleh Pemkot Pekanbaru terkesan dipaksakan hal ini dikarenakan konsep masyarakat madani lebih mengarah pada konsep pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Hal ini tentunya terlalu jauh jika dijadikan sebagai patokan sementara untuk kearifan lokal kita sendiri sudah kaya akan nilai-nilai luhur yang demokratis. Konsep madani identic dengan islam, pada kenyataannya saat ini di kota Pekanbaru masyarakat kita sudah heterogen dan plural, tentunya jika konsep madani diangkat akan menimbulkan polemic dan keberatan bagi mereka yang non-muslim. Kenapa pemerintah kota

tidak mencoba membunyikan pembangunan Smart city berbasis Kearifan lokal tidak perlu diangkat Madaninya. Karena budaya melayu sendiri dasarnya adalah Islam jika kita mengangkat kearifan lokal sudah pasti konsep madani juga terangkat secara otomatis di dalam tetapi tidak menimbulkan polemic dalam masyarakat , bagaimana mungkin etnis pendatang melarang terwujudkan kearifan lokal budaya melayu ditanah asalnya sendiri”.

Ketua Umum MKA LAM ini juga menuturkan bahwa:

”sebenarnya pemerintah kota sendiri masih kurang memahami tentang kebudayaan itu sendiri, sehingga pembangunan budaya melayu di kota Pekanbaru saat ini terkesan berada dibawah bayang-bayang antara mewujudkan konsep madani yang Islami dengan Kearifan lokal budaya melayu yang syarat akan tradisi yang turunkan dari generasi ke generasi”.

Dimensi Budaya (culture)

Government might have created confusing missions that could not be communicated and embraced, were easily undermined by rank corruption and unethical conduct, or were beyond careful

monitoring through performance measurement and management (Pemerintah mungkin telah menciptakan misi yang membingungkan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dikomunikasikan dan dipeluk, dengan mudah dirusak oleh korupsi tingkat dan perilaku tidak etis, atau melampaui pemantauan cermat melalui kinerja pengukuran dan manajemen).

Dari indicator diatas dapat dilihat beberapa point yang diperhitungkan dalam mengukur indicator ini yaitu misi (*mission*), korupsi dan etika (*corruption and ethics*), manajemen kinerja (*performance management*). Dimana ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan terkait hal ini:

- Apakah kebijakan diubah menjadi misi tertentu dan apakah menerima dukungan organisasi?
- Apakah pengiriman dirusak oleh korupsi, perilaku tidak etis atau upaya eksternal?
- Apakah sistem pengukuran kinerja menilai indicator yang benar secara akurat?

Masyarakat madani (*civil society*) merupakan cita-cita politik Islam, untuk menciptakan masyarakat yang berperadaban dan mandiri. Konsep *civil society* diartikan sama dengan konsep masyarakat madani, dimana sistem sosial yang ada dalam masyarakat madani diambil dari sejarah Nabi Muhammad Saw., sebagai pemimpin ketika itu yang membangun

peradaban tinggi dengan mendirikan Negara-Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan untuk hidup bersama dalam suatu dokumen yang di kenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) (Prasetyo, Hendro; Ali Munhanif dkk, 2002).

Istilah masyarakat madani di Indonesia diperkenalkan oleh Datu Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia, dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival Istiqlal 26 September 1995, memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan *civil society*. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang di asas kan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Penerjemahan *civil society* menjadi masyarakat madani didasari oleh konsep kota Ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota dan di sisi lain pemaknaan itu juga dilandasi oleh konsep al-Mujtama' al-Madani yang dikenalkan oleh Naqwib al-Attas (Ubaidillah; Salim Arskhal, 2000, p. 140).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Melayu Yaitu Datuk Oky Thabrani SH Mengatakan bahwa

“Masih banyak ketidak pahaman yang terjadi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat madani yang

berbudaya melayu di kota pekanbaru ini. Kita ambil saja contoh pada anggota dewan kita yang saat ini menduduki kursi DPRD kota, banyak dari mereka yang bukan berasal dari suku melayu, maka dari itu dalam pemakaian tanjak dan busana melayu saja mereka masih banyak kesalahan. Ada di antaranya yang memakai baju melayu digulung lengan bajunya, ada yang disempitkan dan ada yang dipakai bukan pada momennya ini jelas sangat bertentangan dengan aturan yang sebenarnya dalam budaya melayu itu sendiri. Selain itu beragamnya masyarakat yang ada di kota pekanbaru saat ini membuat eksistensi budaya melayu makin menurun karena banyak diantara masyarakatnya lebih tertarik pada budaya-budaya luar seperti budaya minang, jawa dan budaya ocu Kampar. Yang mana sudah jelas bahwa budaya ocu Kampar walaupun dianggap bagian dari Budaya Melayu tapi pada dasarnya sangat berbeda dengan budaya melayu itu sendiri”.

Sikap dan perilaku masyarakat madani sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kebebasan juga harus menjadi *equal rights*, yaitu memperlakukan sesama warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka pemaksaan kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat kepada orang

atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip masyarakat madani

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan civil society (Madani) yang dihadapi pemerintah saat ini diadakan pada gejala: Tingkat densitas sarana komunikasi tinggi namun tidak merata, gap/ disparitas akses informasi antar wilayah dalam kota cukup besar, pemakaian media massa untuk berekspresi belum terkendali, organisasi berserikat yang cukup beragam dan tidak solid, tingginya berbagai problem masyarakat, penegakan hukum yang rendah, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah, isu korupsi yang ada di pemerintahan tinggi, kejahatan kerah putih relative tinggi, korupsi yang dilakukan birokrat, tingkat pemanfaatan IT (*E-government*) masih rendah, komitmen *good governance* pemerintah masih perlu ditingkatkan, arah dan focus IPTEK yang bersifat Sektoral, Ketidaksiapan infrastruktur pendukung akses informasi dan pengetahuan.

Pluralisme dan heterogenitas masyarakat dalam hal etnis, bangsa, suku, perekonomian, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan merupakan satu kondisi yang menyebabkan tiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan cita-citanya sesuai dengan filsafat hidup yang dipegangnya, tentunya dipengaruhi oleh keyakinan, budayanya dan tuntutan situasional.

Jelasnya hal ini memerlukan pemikiran, penataan, dan pengendalian sosial secara bijak untuk menghindari adanya perbedaan yang membawa kepada perpecahan diantara golongan-golongan yang ada dalam pluralisme masyarakat tersebut. Mengingat mewujudkan masyarakat madani diperlukan terciptanya rasa aman dan damai serta ditegakkannya keadilan yang menyeluruh diantara warga masyarakat (Imam Mawardi, 2015).

Ibu Aisyah Novianti Kabid Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga mengatakan :

“ sebenarnya pemerintah kota pekanbaru telah berusaha cukup baik dalam mewujudkan pembangunan budaya melayu melalui berbagai program-program pembangunan tetapi, yah kita kembalikan lagi pada masyarakatnya karena jika kita lihat saat ini masyarakat kota pekanbaru sudah beragam ada yang dari minang, jawa, batak melayu dan china. Tentunya kita juga tidak bisa memaksakan kepada mereka untuk turut terlibat dalam kebudayaan melayu sementara mereka juga punya budaya sendiri jadi oleh karena itu kita juga meminta kepada masyarakat agar turut menyemarakkan dan berpartisipasi dalam pembangunan budaya melayu ini agar budaya melayu itu tidak hilang ditanah asalnya.

Kedepanya ini adalah tantangan bagi kita semua bukan pemerintah saja untuk kembali menghidupkan marwah dari budaya melayu ditanah asalnya ini”.

Budaya atau kultural merupakan sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Abdurrahman, 1995:173) yang pada level terendah mengandung makna suatu kesadaran intuitif dari identitas nilai yang harus diwujudkan. Sedangkan pada label tertinggi, kesadaran akan nilai ini menyiratkan pengetahuan yang luas akan nilai-nilai, hubungan timbal balik dan tingkatan-tingkatannya, dan sejarah proses perkembangan yang dengannya akan dicapai perwujudan kesemestaan nilai itu (Al-Faruqi, 1993:7). Wilayah budaya sebagai tempat eksistensi kebudayaan merupakan sebuah persekutuan yang anggota-anggotanya mentaati suatu kerangka ide dan nilai-nilai yang sama untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan menghindari adanya anarki (Abdurrahman,1995:173).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut; Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan Budaya Melayu yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih terkesan simbolik karena fokus pembangunan budaya melayu itu sendiri lebih diarahkan pada kegiatan pelestarian cagar budaya secara fisik bukan pada pembangunan, pengembangan serta peningkatan eksistensi dari nilai-nilai budaya melayu. Berdasarkan sudut pandang Paul Light Cascade seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pertama dari dimensi kebijakan, disini terlihat jelas bahwa disain kebijakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru lebih berfokus pada perlindungan budaya melayu bukan

pada pengembangan budaya melayu itu sendiri. Ditambah lagi jika dilihat dari dimensi sumberdaya nya yang mana hambatan yang dialami masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu belum adanya payung hukum untuk situs-situs yang dianggap cagar budaya, belum bakunya berbagai bentuk kesenian melayu yang menjadi ciri khas dari kota pekanbaru, serta masih banyaknya jumlah lembaga dan sanggar seni budaya melayu yang belum terdaftar. Dimensi *Struktur* kemampuan daerah belum cukup memadai dalam memberikan rantai komando. Bahkan belum cukup dalam memudahkan dan menetapkan struktur birokrasi kelembagaan belum sesuai dengan aturan, belum optimalnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD).

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti berusaha memberikan saran demi tercapainya progress terhadap pembangunan budaya melayu Di Kota Pekanbaru:

1. Sebaiknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mendisain kebijakan tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya melayu saja tetapi juga mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan budaya melayu yang syarat akan pengembangan nilai-nilai budaya melayu yang mulai terkikis dan membangkitkan

eksistensi budaya melayu dalam kawasan lokal.

2. Pada dimensi *Struktur*, harus adanya penetapan struktur birokrasi sesuai dengan situasi dan kondisi internal lembaga dan wilayahnya di Kota Pekanbaru mempertahankan dan melaksanakan uraian tugas, diharapkan struktur berjalan secara ideal dengan rantai komando yang semakin jelas dan saling mendukung.
3. Pemamfaatan teknologi informasi dalam publikasi kegiatan kebudayaan terkait pembangunan dan pengembangan budaya melayu perlu ditingkatkan dan diperbaiki, diharapkan pemerintah kota melalui dinas kebudayaan harus mampu melakukan publikasi kegiatan kebudayaan dengan lebih terbuka dan menarik lagi. Penggunaan media sosial seperti facebook, instagram jika perlu melibatkan akun-akun lokal yang sudah besar diwilayah kota peknabru jangan hanya Sberpatokan pada akun milik Pemerintah Kota dan DISBUBPAR saja.

Daftar Pustaka

Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*.

Jakarta: Salemba Humanika.

Adi Suryadi Cula. (1999). *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori Dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Adlin. (2013, Desember). *Metode Penelitian Sosial*. Retrieved September Minggu, 2020, From Reseachgate.Net: https://www.researchgate.net/publication/339353176_Metode_Penelitian_Sosial

Agus S. Eko Madyo. (2018). *Identitas Budaya Lokal Kota-Kota Nusantara Di Era Globalisasi Study Kasus : Perwujudan Identitas Budaya Melayu Dan Fenomena Atap Salembayung Pada Arsitektur Kota Pekanbaru Riau*. *Makalah*.

Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Alfarabi. (2019). *Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau Di Pekanbaru. Jurnal Kaganga.*
- Almasdadi Syahza. (2009). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Andi Heny Mulyadi. (2018). *Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif Dan Politis Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota. E-Jurnal Ipdn*.
- Apriyanto, K. (2018). *Firdaus Paparkan Empat Indikator Masyarakat Madani*. Pekanbaru: Cakaplah.Com.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Chandra Eko Wahyudi; Mochamad Hariadi. (2016). *Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangan Bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi Dan Bisnis.*
- Dwi Sulisworo. (2013). *Peningkatan Civil Society Untuk Kemajuan Iptek Dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Eddy Purnama. (2013, April). *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh*. Retrieved July Jumat, 2019, From [Jurnal.Unsyiah.Ac.Id: Http://Www.Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Kanun/Article/View/6157](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id)
- Efendi, B., & Hasanudin, D. (2014). *Negara Dan Masyarakat Sipil Study Hubungan Pemerintah Daerah Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (Lamriau). Jurnal Online Mahasiswa.*
- Efendi, B., & Hasnudin, D. (2014). *Negara Dan Masyarakat Sipil Study Hubungan Pemerintah Dearah Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (Lamriau). Jurnal Online Mahasiswa.*
- Ermanita. (2017, Oktober). *Sinergitas Pembangunan Kebudayaan Melayu Studi Dunia Melayu Dunia Islam (Dmdi) Provinsi Riau*. Retrieved Juli Kamis, 2019, From [Neliti.Com: Https://Media.Neliti.Com/](https://media.neliti.com)

- Media/Publications/18910
5-Id-Sinergitas-
Pembangunan-
Kebudayaan-Melayu.Pdf
- Fahima Diah Annisa, S. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Fahrul Rozi. (2016). *Mewujudkan Pekanbaru Sebagai Metropolitan Madani*. Pekanbaru: Goriau.Com.
- Gun Faisal; Dimas Wihayanto . (2013, Juni). *Salembayung Sebagai Identitas Kota Pekanbaru: Kajian Langgam Melayu* . Retrieved Juni 2020, From Journal.Unessa.Ac.Id: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/2694>
- Hassanuddin , T. (2015). *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu Tahun 2008-2013*. Skripsi.
- Hubertus Oja. (2016). *Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik*. *Ejournal.Unmus*.
- Imam Mawardi. (2015, Desember). *Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani Membangun Kultur Etika Sosial*. Retrieved Agus 2020, From Neliti.Com: <https://www.neliti.com/publications/58549/dimensi-dimensi-masyarakat-madani-membangun-kultur-etika-sosial>
- Noor Efni Salam. (2017). *Masyarakat Dan Budaya Melayu Revitalisasi, Strategi Dan Pelestariannya*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Noor Efni Salam. (2017). *Penerapan Simbol Arsitektur Perumahan Masyarakat Riau (Salembayung) Sebagai Strategi Dalam Melestarikan Budaya Melayu*. *Prosiding*.
- Nugroho, R. (2007). *Analisis Kebijakan* . Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Rvisi Risk Mnagement Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagaib The*

- First Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Hendro; Ali Munhanif Dkk. (2002). *Islam Dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Ratna Dewi; Meri Sondara. (2019). Analisis Manajemen Strategi Uin Suska Riau Dalam Mempersiapkan Sarjana Yang Mampu Bersaing Menghadapi Mea. *Jurnal El-Riyasah* .
- Riant Nugroho . (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Saida Dahlan . (204). Budaya Melayu Riau Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Budaya*.
- Samin, R. (2018). Pentingnya Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Penyiaran Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Sari Wahyuni . (2016). *Qualitative Reseach Method Theory And Practise Second Edistion*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Widharetno Mursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Sondang P. Siagian. (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Suroto. (2015). Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis) . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* .
- Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan Di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* .
- Ubaidillah; Salim Arskhal. (2000). *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, Ham & Masyarakat Madani / Oleh Tim Penyusun Puslit Iain Syarif Hidayatullah*. Retrieved From Catalog.Nla.Gov.Au:

[https://Catalogue.Nla.gov.Au/Record/2307580](https://catalogue.nla.gov.au/Record/2307580)

Vita Fitria; Sri Agustin Sutrisnowati. (2013). *Civil Society, Konsep Ummah Dan Masyarakat Madani. Journal Uny.*

Wirawan . (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Salema Empat.